

PENGUATAN PENDIDIKAN ETIKA ISLAM UNTUK PEREMPUAN SEBAGAI PREVENSI MASIFIKASI KORUPSI

Mirin Primudyastutie
Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Email : mirinprimudyastutie@unisma.ac.id

Siti Marwiyah
Universitas Dr Soetomo Surabaya
Email : sitimarwiyah@gmail.com

Dwi Ari Kurniawati
Universitas Islam Malang
Email : dwi.ari@unisma.ac.id

Abstrak

Korupsi merupakan salah satu "penyakit" serius yang menimpa atau menguji ketahanan bangsa Indonesia. Di wilayah manapun dan di unit-unit kelembagaan yang berhubungan dengan tata kelola keuangan negara, baik dari pusat maupun daerah, korupsi nyaris selalu mengikutinya. Seolah dimana ada uang negara, disitulah korupsi muncul. Akibat kondisi ini, semua subyek bangsa, khususnya yang merasa punya kewajiban moral untuk berupaya melakukan penanggulangan atau pencegahan. Perempuan merupakan subyek bangsa terdidik yang ikut punya kewajiban demikian, sehingga logis jika ada penguatan pendidikan etik Islam tentang anti korupsi.

Kata Kunci: korupsi, perempuan, penguatan, pendidikan, etika

Abstract

Corruption is one of the serious "diseases" that befall or test the resilience of the Indonesian nation. In any area and in institutional units related to state financial management, both from the central and regional levels, corruption almost always follows. As if where there is state money, that's where corruption appears. As a result of this condition, all subjects of the nation, especially those who feel they have a moral obligation to try to take action or prevent it. Women are the subject of an educated nation who also have such obligations, so it is logical if there is a strengthening of Islamic ethical education on anti-corruption.

Keywords: corruption, women, strengthening, education, ethics

PENDAHULUAN

Korupsi yang sepertinya sudah menjadi budaya di negeri kita sudah tidak bisa dipandang sebelah mata lagi, bahkan keterlibatan perempuan dalam sejumlah kasus korupsi juga semakin meningkat. Menurut catatan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), sejak tahun 2007 hingga saat ini tercatat sebanyak 29 perempuan tersangkut masalah korupsi, baik itu terlibat secara langsung ataupun tidak langsung, ada yang sudah ditahan maupun yang masih dalam proses di persidangan. Johan Budi saat jafi Juru bicara KPK dalam peluncuran gerakan memberantas korupsi dengan tema “Saya Perempuan Antikorupsi” di Jakarta ini mengatakan masuknya perempuan dalam lingkaran tindak pidana korupsi amat rentan sekali. Hal ini yang mendorong KPK untuk fokus memberantas korupsi hingga ke lingkungan keluarga, terutama perempuan.¹ Perempuan telah melahirkan pejuang anti korupsi, di samping melahirkan para produsen korupsi. Ketika di negeri ini banyak korupsi, logislah kalau perempuan dijadikan sebagai pihak yang bertanggungjawab.²

KPK melihat pemberantasan korupsi harus menyentuh hingga kelompok terkecil, seperti keluarga. Disini diperlukannya perempuan untuk menjadi tonggak negara dan keluarga untuk menanamkan nilai-nilai positif generasi selanjutnya terutama sikap antikorupsi. Selain itu, perempuan juga dinilai memiliki posisi penentu dalam perusahaan atau profesi di bidang lainnya, sebagai makhluk sosial yang bereksistensi, kesadaran antikorupsi juga sangat penting untuk menjadi landasan memberantas korupsi. Untuk itu sejak 3 tahun yang lalu KPK sudah *concern* dengan pemberantasan korupsi, termasuk peran perempuan yang begitu besar di dalamnya.³

Seringkali gerakan korupsi dimaknai sebagai hal yang heroik. Ia muncul di media dengan tindakan dan penangkapan terhadap kasus-kasus besar. Padahal bila ditelisik mendalam, akar korupsi juga berawal dari “keengganan” semua pihak saat benih-benih korupsi mulai bersemi, yaitu di ranah kehidupan nyata. Keluarga dan ranah kehidupan sehari-hari menjadi contoh nyata.⁴

¹Hasan Ramadhan, *Perempuan dan Korupsi*, <http://www.jurnalperempuan.org/perempuan-dan-korupsi.html>, Akses 1 September 2021.

²Sudibyo, *Perempuan, Birokrasi, dan Korupsi*, Lautan Ilmu, Jakarta, 2010, hal. 33.

³Hasan Ramadhan, *Loc.Cit.*

⁴Maeda Yoppi, *Gerakan Perempuan dan Korupsi*, <http://www.asppuk.or.id/index.php/berita/134-gerakan-perempuan>, akses 2 September 2021.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif bertujuan untuk mendeskripsikan, memahami, dan menginterpretasi fenomena-fenomena, peristiwa, aktivitas sosial yang terjadi di tentang beberapa kasus korupsi yang melibatkan perempuan dan bagaimana keharusan perempuan dalam pencegahan masifikasi korupsi di Indonesia.

Jenis penelitoian ini adalah studi kasus (*case study*) yang dipilih dalam penelitian ini, karena penelitian dilakukan terhadap suatu kesatuan system, budaya, atau kondisi yang terbaca dalam bentuk program, aktivitas, peristiwa-peristiwa atau sekelompok.⁵

PEMBAHASAN

Membaca Akar Kriminogen

Pengedukasian masyarakat itu dengan menjadikan keluarga, terlebih yang mempunyai anak-anak remaja sebagai target utamanya. Pola edukasi ini akan menjadi kekuatan preventif untuk mencegah akselerasi organisasi teroris, pasalnya darai keluarga sudah tersedia benteng kuat yang memproteksi anak-anaknya. Sedangkan pola eduksi di rumah, khususnya [endidikan etika Islam ini terletak pada ibu (perempuan).

Keluarga seperti kata Jalaluddin Rachmat merupakan “madrasah” yang menentukan hitam putihnya kepribadian anak atau sebagai institusi yang menentukan tumbuh bekembangnya kejahatan di tengah masyarakat, termasuk korupsi.⁶

Sering terjadi kasus dimana anak-anak mencuri harta atau uang ayah atau ibunya. Orang tua kemudian membiarkannya sebagai kebiasaan atau diingatkan seperlunya. Kasus demikian ini setidaknya dapat dijadikan sampel perbandingan, bahwa kerapuhan dan krisisnya konstruksi keluarga merupakan faktor kriminogen yang menyebabkan berbagai jenis penyakit menyerang dan tumbuh berkembang, baik mulai dari “korupsi” moral hingga yang merugikan kepentingan masyarakat berbasis atau erani melakukan pelanggaran ideologi dan agama.

Akibat dari kondisi itu, banyak hal yang bermakna menjadi disfungsi. Doktrin kebenaran, kejujuran, dan cinta tanah air yang seharusnya melekat dalam diri anak, bisa tereduksi dan lambat laun terusir ketika ia tidak mendapatkan sumber pembelajaran yang benar dan berlangsung kontinuitas

⁵ M. Djunaidi Ghony & Fauzan Al Manshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: ArrRuz Media, Jogjakarta, 2014, hal, 89 .

⁶ Miftahul Huda, *Beda Ideologi Teroris dengan Koruptor*, Independesi Pres, Jakarta, 3017, hal, 43.

Ada satu teladan yang bisa dijadikan bahan refleksi: "Kartini berada dalam proses dari kegelapan menuju cahaya (*doorduisternis Tot Licht*)⁷ Julukan untuk Kartini itu diraihinya berkat perjuangannya dalam membebaskan diri dan masyarakatnya dari belenggu diskriminasi dan cengkeraman perbuatan kotor seperti penyalahgunaan kekuasaan. Apakah julukan itu masih bisa disandang Kartini sekarang?

Dapat terbaca dewasa ini, citra diri perempuan terkoyak akibat keterlibatan sebagian dari kaum hawa ini dalam kasus korupsi. Pernah maraknya isu gratifikasi seks membuktikan, bahwa perempuan telah menyumbangkan sejumlah kasus korupsi. Mereka bukannya menjadi motor gerakan melawan korupsi, tetapi justru terlibat menjadi segmentasi sindikasi korupsi.

Mereka itu tidak belajar tentang realitas logis soal cara mendapatkan dan membelanjakan uang. Begitu ada uang, prinsip pragmatis seperti "siapa yang tidak mau diberi uang sepuluh juta rupiah" atau "senyampang ada orang baik hati dan memberi uang banyak", langsung dijadikan opsinya.

Prinsip itulah yang membuat perempuan rentan terjerat korupsi. Sebagai perbandingan analisis, Ketika aparat penegak hukum menemukan sejumlah rekening istri sebagai "rekening titipan" harta tidak jelas asal-usulnya dari suaminya yang tersangkut dan sedang diusut perkara korupsinya, maka logis kalau gugatan publik menyebut bahwa isteri (ibu) juga merupakan segmentasi dari praktik kriminalisasi jabatan. Isteri dalam "wilayah" *abuse of power* ini akhirnya tak ubahnya sebagai pembentuk, "pengembang", dan bahkan penguat tradisi korupsi..

Memang, kaum hawa di seputar keluarga, merupakan pilar strategis dan sinergis, yang menentukan anatomi ringkih atau kuatnya keluarga, sehingga saat suami diduga terlibat korupsi, isteri (perempuan) atau anaknya pun ikut terseret. Tidak jarang, akibat suami yang diberitakan secara gencar sebagai pelaku korupsi, isterinya tidak berani ke pasar, sekolah, atau pusat-pusat keramaian, pasalnya isteri ini takut dijadikan sasaran cemoohan dan kebencian publik, khususnya dari sesama kaum hawa.

Tuduhan keterlibatan perempuan dalam rangkaian drama merajalelanya korupsi di negeri ini, setidaknya pernah terungkap dalam kasus-kasus besar. Misalnya dalam persidangan Mantan pegawai Ditjen Pajak beberapa tahun lalu, Bahasyim Assifie diketahui menyimpan uang yang diduga hasil korupsi terkait kasus korupsi uang pajak dalam rekening istri dan anaknya.

⁷ Syamsuri, *Membaca Jejak-jejak Perlawanan Perempuan terhadap Ketidakadilan*, Visimedia, Jakarta, 2011, hal. 2.

Bahasyim membukakan rekening lain atas nama Sri Purwanti (istri), Winda Arum Hapsari (anak), dan Riandini Resanti (anak) di beberapa cabang Bank BNI. Jaksa mencurigai kalau dengan pekerjaannya sebagai PNS, dia diperkirakan hanya mempunyai penghasilan sekitar Rp 30 juta perbulan, tetapi ternyata Bahasyim mempunyai rekening tidak kurang dari Rp1,341 triliun.⁸

Dedi Rachim, saat dalam kapasitas sebagai pejabat KPK, saat pertemuan Serial Meeting Perempuan Anti Korupsi, yang difasilitasi KPI, Kamis 11 Oktober 2012, di Galeri rumah Tamu 678, Kemang Selatan Raya No 125-A, Jakarta. Menurutnya, perilaku masyarakat yang menginginkan segala sesuatu serba instan dan malas menjalani aturan yang berlaku, turut memberi ruang bagi terbukanya praktik korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Orangtua ikut berkontribusi mendukung nilai-nilai dan perilaku tidak baik bagi anak-anaknya, sebagai contoh dalam pengurusan KTP atau SIM untuk anak-anak mereka yang telah remaja, seringkali orangtua mengambil jalan pintas dengan menyogok pihak-pihak tertentu agar proses pengurusan cepat selesai. Hal-hal seperti ini tidak boleh terus menerus dilakukan, karena pada akhirnya merusak nilai-nilai dan melanggengkan praktek korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Pencegahan anti korupsi haruslah dimulai dari keluarga dimana Ibu haruslah memberikan nilai-nilai positif anti korupsi bagi anak-anak mereka dimulai dari rumah.⁹

Menurut Agus Sunaryanto, saat menjabat wakil Ketua Indonesia Corruption Watch (ICW), keterlibatan perempuan dalam lingkaran korupsi disebabkan oleh sikap yang tidak kritis dari perempuan sehingga ikut terjerumus dalam praktik korupsi. Namun tidak tertutup juga kemungkinan perempuan menjadi pelaku sentral dalam tindak korupsi, sedangkan kelompok perempuan yang masuk ke lingkaran kekuasaan sangat rentan untuk ikut terjerumus. Agus juga menambahkan, keterlibatan perempuan dalam kasus korupsi dari tahun ke tahun dipengaruhi oleh sistem kekuasaan di Indonesia yang masih bercorak patriarkat. Beberapa contoh perempuan yang terjerat korupsi diantaranya Wa Ode Nurhayati, yang pada saat tertangkap tangan oleh KPK ia masih menjadi anggota DPD-RI dari PAN. Kemudian ada anggota DPR-RI dari Partai Demokrat Angelina Sondakh, yang menerima hadiah dan janji terkait anggaran di Kementerian Pemuda dan Olahraga dan Kementerian Pendidikan Nasional, dan masih banyak lagi perempuan yang mempunyai jabatan publik terlibat kasus korupsi. Praktik kekuasaan kita masih sangat patriarkat, mereka yang banyak terjerat bisa juga perempuan yang menjadi korban patriarki tersebut. Artinya, perempuan

⁸Maulana Ishak, *Koruptor Regeneratif (Catatan Harian untuk Berita Para Koruptor)*, Makalah, Malang, 2013, hal. 2.

⁹Maeda Yopp, *Loc. Cit.*

disini harus lebih kritis dan berhati-hati agar tidak terjerumus atau masuk dalam lingkaran korupsi.¹⁰

Dalam kasus itu mengindikasikan kalau sang isteri gagal memainkan peran maksimalnya sebagai pejuang kebenaran, kejujuran, dan keadulan dalam konstruksi keluarganya. Perempuan belum menunjukkan kemampuannya sebagai pemimpin yang bisa mengarsiteki keluarganya untuk menjadi keluarga yang “sehat” secara moral-spiritual. Suami tergiring atau termotivasi untuk melakukan dan memperluas korupsi. Suami bahkan menjadi kian liar dan liberal dalam melakukan korupsi akibat secara terus menerus distimulasi untuk mencari harta apa saja secara permisif oleh isterinya.

Hal itu tidak lepas dari orientasi materialistik yang ditahbiskan, yang penahbisannya ini membuka ruang semakin lebar bagi merajalelanya korupsi. Filosof kenamaan Aristoteles mengingatkan ”semakin tinggi penghargaan manusia terhadap kekayaan, maka semakin rendahlah penghargaan manusia terhadap kesuciaan, kebenaran, dan keadilan.”¹¹ Kehancuran bagi mereka yang menuhankan uang, itu benar adanya dan begitu banyak bukti nyatanya. Tak jarang seseorang menjual kesucian demi uang, dan tak sedikit orang yang menjual agamanya demi uang.¹²

Korupsi bukan sekadar perbuatan melawan hukum, melainkan juga kejahatan kemanusiaan yang memiliki dampak buruk yang serius terhadap keberlangsungan umat manusia. Korupsi bahkan bisa menjadi salah satu faktor penyebab kegagalan negara. Noah Chomsky¹³ (2006;38) menyatakan bahwa karakteristik negara yang gagal (*failed state*) antara lain: negara tidak punya kemampuan melindungi warga negara dari berbagai bentuk kekerasan, tidak terjaminnya hak-hak warga negara, lemahnya institusi demokrasi, sikap agresif yang sewenang-wenang dari pemerintah, lemahnya penegakan hukum, serta maraknya penyalahgunaan kekuasaan.¹⁴

¹⁰ Hasan Ramadhan. *Loc. Cit.*

¹¹ Abdul Wahid, *Kearifan Bernegara*, Surabaya, Mahrsindo, 2010, hal. 65.

¹² Linda Siti Komah, *Uang Bukan Tuhan. Tapi Kehancuran bagi Mereka yang Menuhankan Uang*

http://www.kompasiana.com/dolphin_nda/uang-bukan-tuhan-tapi-kehancuran-bagi-mereka-yang-menuhankan-uang_551087f2a33311cf39ba83cb, akses 2 September 2021.

¹³Noam. Chomsky (2006), *Failed State, The Abuse of Power and The Assault on Democracy*. Diunduh dari <http://libgen.info/view.php?id=306037>. Diakses 6 Desember 2019/

¹⁴ Dewi Sekar Kencono dan Bhakti Wisnu Wardhana *Perempuan Dan Korupsi Pada Ranah Publik (Ditinjau dari Gaya Kepemimpinan, Politik, Agama, Psikologi dan Budaya Ketimuran)*, dalam <http://ejournal?Undip>, akses 16 Desember 2021.

Selain itu, di antara tabiat dasar manusia adalah suka pada harta benda (materi). Tidak pernah bosan-bosannya materi dicari dan diburu hingga kadang kelewat batas dan menerjang rambu-rambu larangan yang seharusnya dihindari. Tujuan hidup manusia pun kadang secara perlahan-lahan berubah haluan, yakni menjadi pemburu materi tanpa tahu harus diapakan materi yang telah didapatnya itu.¹⁵

Salah satu bentuk harta benda (materi) yang diburu itu adalah uang. Demi mendapatkannya, manusia dengan sukarela memeras keringat dan banting tulang. Pergi pagi pulang malam. Kadang, makan dan tidur, apalagi ibadah pun tak sempat. Demi uang, segala upaya dilakukan, dari mulai yang halal, syubhat, hingga yang haram. Dan, tidak sedikit manusia yang terjerumus ke dalam cara-cara yang syubhat dan haram demi mendapatkan uang.¹⁶

Uang memang telah menjadi kebutuhan primer sehari-hari manusia. Denyut hidup manusia nyaris selalu beriringan dengan keberadaan uang. Bagaikan air, uang mengalir dari pagi, siang, sore, malam, hingga pagi lagi. Tanpa uang, manusia akan kesulitan menghadapi hidup. Apalagi, ketika manusia yang tak beruang itu juga menanggung beban hidup manusia lain (keluarga). Beban kian berat manakala kebutuhan sehari-hari naik harganya, yang sudah tentu, itu memerlukan uang yang juga bertambah.¹⁷

Dalam ranah pragmatisme itu, tidak jarang yang dijadikan tolok ukur keberhasilan suami, adalah jenis suami yang sukses dalam karir, yang karirnya ini mampu mendatangkian uang (kekayaan) sebanyak-banyaknya. Ketika suami pulang kerja atau mengadakan kunjungan kerja misalnya, yang ditanyakan bukannya bagaimana kualitas kerjanya dalam relasinya dengan kepentingan publik atau kemaslahatan strategis lainnya, tetapi lebih sering atau akrab pada keuntungan, *oleh-oleh*, atau berapa besar uang yang bisa “diamankan” dan diberikan untuk keluarga.

Perempuan dalam ranah itu merupakan sosok yang mengidap penyakit rakus harta dan penahbisan status sosial, yang kedua penyakit ini berjalan beriringan. Suami bisa menjadi mesin kepentingan perempuan yang merasa jatuh gengsi sosialnya untuk melakukan pekerjaan yang terbilang ilegal dan misi yang tidak mungkin (*mission impossible*).

Kepentingan publik yang menjadi “proyek istimewa” karier dan profesi suami, tidak ditanyakan “sejarahnya” oleh sang isteri. Isteri hanya mengalkulasi apa dan berapa besar yang bisa didapat setiap suami

¹⁵Fajar Kurnianto, Menuhankan Uang, <https://serambiwacana.wordpress.com/2012/07/31/menuhankan-uang/>, akses 2 September 2021.

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ *Ibid.*

menjalankan aktifitas yang menyita waktu di kantor atau di luar rumah, atau setidaknya isteri tidak merespon secara positif jenjang karir dan jabatan suami yang terbilang tidak “strategis”.

Ironisnya, saat suami hanya menunjukkan prestasi-prestasi moral dan intelektual ketika mengemban (mengelola) jabatan publik, dukungan dari istri bersifat setengah hati dan bahkan memperlakukannya sebagai “kepala keluarga yang gagal”. Kegagalan ini ditembakkan pada suaminya yang tidak berhasil mengangkat gerbong kapitalisme profesi atau komoditi profetis eksklusifnya dalam keluarga.

Akibat perlakuan dari isteri seperti itu, suami memilih memerangkapkan dirinya dalam lingkaran kriminalisasi profesi atau jabatannya. Mereka tergiring memasuki dunia kompetisi di kantor atau komunitas kerjanya dengan menggunakan paradigma permisifisme yang diajukan Machiaveli, bahwa demi dan melalui kekuasaan, apa saja “halal” diraih, Sedangkan untuk meraihnya, segala cara apapun dibenarkan dan dijadikan sebagai pilihan (*het doel heiling de middelen*).¹⁸

Bukti “keberhasilan” pola permisifikasi kekuasaan dapat terbaca dalam kasus korupsi atau penggerogotan pajak, yang nilainya fantastis, yakni hingga Rp 240 triliun atau 4 persen per tahun. Kasus ini, sebagaimana yang terjadi dalam kasus Gayus (yang mulai dilupakan publik) misalnya, mengindikasikan terdapat kesalahan isteri, pasalnya sang isteri dijadikan sebagai “sarang” pengalihan pengaliran kekayaan illegal. Beberapa miliar rupiah yang dikirimkan Gayus kepada isterinya ini mengisyaratkan kalau perempuan rentan jadi segmentasi kriminalisasi.

Sikap yang terbaca dalam kasus itu layak direfleksi sebagai kegagalan “Kartini” (perempuan) dalam konstruksi gerakan politik melawan korupsi. perempuan tidak menggunakan statusnya sebagai “*khalifah*” utama dalam mengerim kecenderungan suami dalam melakukan penyimpangan amanat. Bahkan, perempuan layak dipersalahkan telah menjadi sosok yang menstimulir hasrat suami untuk berani korupsi, dan bukan suami yang militan dalam berjihad melawan mental buruk seperti korupsi atau segala bentuk penyalahgunaan amanat.

Suami yang gagal menempatkan dirinya sebagai subyek “cerdas” (mampu menerjemahkan kepentingan obyektif dan berlaku tegas) dalam keluarga atau kehilangan keberdayaan di samping isterinya merupakan profil suami yang tak ubahnya mesin yang mengikuti alur kepentingan dan “syawat” yang ditentukan oleh isterinya. Suami demikian menjadi suami yang bukan hanya gagal membentuk dirinya sebagai pemimpin yang militan dalam menghadapi tantangan yang bermaksud menjerumuskan diri dan

¹⁸ Bambang Satriya, *Hukum Indonesia Masih di Simpang Jalan*, Nirmana Media, Jakarta, 2013, hal. 89.

keluarga, serta menghancurkan bangsanya, tetapi juga jadi suami yang berstatus sebagai akar penyebaran dan pelanggengan penyakit penyimpangan kekuasaan.

Dalam suatu logika, perempuan bisa membuat negeri semakin terhegemoni oleh korupsi akibat kegagalan isteri dalam mengawal atau mengaudit kekayaan suaminya, seperti mempertanyakan “sejarah” besaran tabungan atau deposito, serta surat-surat berharga yang dimiliki suaminya.

Perempuan itu tiang negara. Kalau tiang negara rapuh, tentulah negerinya juga tidak kuat. Kalau perempuannya rapuh, berarti akan banyak kondisi buruk dialami dan menimpa negara.. Kalau perempuan melangkah lebih jauh dalam bentuk ”merapuhkan” mental suami, maka ini namanya sosok Kartini modern yang ”pintar” menghancurkan citra keluarga dan kejayaan negara.

Sebaliknya, mental suami akan bisa dicegah dari kecenderungan terjerumus dalam kultur kleptokrasi kekuasaan atau penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), kalau perempuan berani berkata ”tidak” atau tidak mengamini saat suaminya membawa harta ilegal atau tidak jelas masuk dalam keluarganya.

Perspektif Pendidikan Etika Islam

Penyakit bangsa seperti korupso dapat diperangi atau minimal dicegah terjjadinya dengan Pendidikan etika Islam. Pendidikan ini tidak semata yang gencar disampaikan oleh keluarga atau orang tua kepada anak-anaknya, tetapi yang fundamental adalah keteladanan kepada mereka. Semakin baik keteladanan yang ditunjukan orang tua, maka akan semakin baikkkan terbentuknya kepribadian mereka.

Nabi Muhammad SAW bersabda, bahwa wanita adalah tiang negara, jika baik Wanita suatu Negara maka baiklah Negeranya. Bilamana rusak mereka maka akan hancur pulalah Negeranya. Hal ini menunjukkan posisi strategisnya perempuan. Perempuan menjadi penentu ;emah tidaknya konstruksi negara.

Ada suatu logika yang tidak terbantahkan, bahwa lemah atau kuatnya suatu negara, perempuan menjadi akar penyebabnya. Ketika negara mengalami banyak masalah di sudut penyimpangan atau penyalahunaan kekuasaan, maka perempuan akan menjadi obyek yang dipersalahkan. Ketika lelaki atau suami terjebak dalam penggunaan aggaran atau uang secara salah, maka perempuan dituntut pertanggungjawabannya.

Uang memang salah satu sumber kebahagiaan, tapi bukan hanya uang sumber kebahagiaan dalam hidup ini. Sesekali kehancuran itu akan datang, ketika mereka yang terbiasa hidup dengan mudahnya karena uang, lalu terjatuh dalam lubang yang sebenarnya dangkal, tapi karena mereka

terbiasa dengan kemudahan itu, maka lubang dangkal tersebut menjadi sangat dalam.¹⁹

Marilah melakukan refleksi terhadap kehidupan penuh kesederhanaan, mereka yang terbiasa melakukan semuanya sendiri, bahkan masih sempat memikirkan untuk membantu sesama walau sebenarnya merekapun dalam keadaan pas-pasan. Disini kita bisa merasakan suatu hal yang tidak bisa dibeli, tidak berbentuk tersebut secara nyata, yaitu kasih sayang, ketulusan dan keikhlasan atas sesama. Bahkan disini kita bisa menemukan sahabat sejati, sejatinya seorang sahabat, yaitu ketika kita salah mereka mengingatkan, mereka yang mengajak kita dalam kebaikan dan mengajak kita berlomba-lomba dalam hal yang positif. Bersyukurlah bagi kita yang tidak menuhankan uang, melainkan mampu mengaturnya untuk hal-hal positif. Sesekali jika ada masalah, sungguh disana bisa ditemukan pelajaran, dan dari sana akan terbentuknya pribadi yang tegar, penyabar dan penuh keikhlasan. Demikian inilah yang tidak dimiliki mereka yang menuhankan uang.²⁰ Menuhankan uang menjadi salah satu penyakit yang sedang “menggoda” sebagian perempuan Indonesia. Keterjebakan perempuan dalam perkara penyalahgunaan kekuasaan menjadi buktinya.²¹ Kalau sejak dini, setiap elemen keluarga dibudayakan hidup sederhana, bukan memuja uang atau kemewahan, maka kecenderungan menyalahgunakan amanat apapun bisa dicegah,

Meskipun tidak secara langsung mengkritisi keluarga, tapi ada pesan moral yang dipertimbangkan. Menurut Shihab terdapat tiga langkah yang dilakukan untuk menuju inklusivisme agama, *Pertama*; setiap kelompok agama harus memiliki kemauan, kesadaran, serta mau mendengarkan satu sama lain tanpa harus mengorbankan prinsip-prinsip ajaran agama yang dianutnya. *Kedua*, setiap penganut agama harus mampu melepaskan perasaan benci historis mereka dan bersama-sama melibatkan serta menganjurkan nilai-nilai dasar yang dilandaskan pada ajaran agama masing-masing *Ketiga*, para tokoh dan pemuka agama harus menentukan arah, strategi dan langkah-langkah agar para pengikutnya bisa menerapkan secara penuh kesadaran dalam mengerjakan ajaran berdasarkan keimanannya seraya menumbuhkan sikap toleransi beragama yang merupakan tujuan utama sebagai tujuan yang didukung dan dimajukan oleh Negara.²² Dari sisi ketiga, Shihab menekankan agar para tokoh agama, termasuk perempuan

¹⁹ Linda Siti Komah, *Loc. Cit. Bandung*,

²⁰ *Ibid.*

²¹ Umi Farida, *Perempuan dan Korupsi*, Makalah untuk Kelompo Perempuan Anti Korupsi, Malang, 2012, hal. 2.

²² Alwi Shihab, *Islam Inklusif: Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Mizan, 1997, hal. 35-36.

yang memang menjadi tokoh utama dalam keluarga untuk berupaya membangun ketaatan beragama.

Kedudukan perempuan dalam Islam memang istimewa. Logis soal kedudukan perempuan yang disabdakan Nabi di atas, karena negara dimanapun di dunia ini mengandalkan proses regenerasi dan proses pembelajarannya yang berelasi dengan peran perempuan. Terjadinya proses alih generasi, atau kepemimpinan, ditentukan oleh peran reproduksi dan edukasi perempuan. Perempuan yang giat melibatkan diri dalam proses pembelajaran anti korupsi, berarti ia memang mampu menunjukkan sosok dirinya anti korupsi, dimanapun dan dalam kondisi apapun.

Haruslah diakui siapapun, bahwa seorang perempuan akhirnya menjadi pemimpin sejati. Apa yang diperankannya, melibatkan semua komponen bangsa. Ketika seorang suami atau anak-anak berkiprah dalam pekerjaan, profesi, atau aktifitasnya, yang kemudian hal ini berurusan dengan penyalahgunaan kekuasaan (*abuse of power*), maka perempuan mestilah diikutkan dalam ranah pertanggungjawabannya, karena perempuan adalah salah satu pimpinan dalam keluarga. Baiknya buruknya bangsa atau negara ikut ditentukan oleh baik buruknya keluarga.

Ketika keluarga seseorang itu baik atau bertatakelola sesuai dengan norma agama, maka masyarakat dan negara pun ikut menerima pengaruh positifnya. Adapun diantara pengaruh positifnya ini adalah dapat diprevensinya kecenderungan berlaku buruk atau tidak etik seperti menyalahgunakan apa yang bukan menjadi haknya (korupsi).

KESIMPULAN

Sudah terbaca dan bisa dirasakan oleh bangsa Indonesia, bahwa korupsi telah membuat bangsa Indonesia mengalami ketidakberdayaan di berbagai sektor strategis. Ketidakberdayaan ini menunjukkan, bahwa korupsi telah berhasil menjadi penyakit yang serius di tengah masyarakat. Koruptor ini bisa muncul dari mana-mana, termasuk keluarga.

Salah satu faktor penyebab yang dikaitkan dengan korupsi adalah soal kepemimpinan. Kalau mentalitas pemimpin ini tidak dibenahi, maka korupsi akan tetap terus terjadi dan marak. Salah satu pemimpin yang bertanggungjawab terhadap korupsi adalah perempuan. Perempuan bukan hanya pemimpin di sektor domestik, tetapi juga pemimpin di sektor publik. Dalam ranah inilah, perempuan, khususnya ibu mempunyai kewahiban memberikan modal pendidikan etika bagi anak-anaknya. Kalau dari kecil mereka terbiasakan demikian, maka kalau besar akan bisa memprevensi dirinya dari melakukan korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku dan Makalah

- Abdul Wahid, *Kearifan Bernegara*, Surabaya, Mahrsindo, 2010.
- Alwi Shihab, *Islam Inklusif :Menuju Sikap Terbuka Dalam Beragama*, Mizan, 1997
- Bambang Satriya, *Hukum Indonesia Masih di Simpang Jalan*, Nirmana Media, Jakarta, 2013.
- M. Djunaidi Ghony & Fauzan Al Manshur. *Metodologi Penelitian Kualitatif*: ArrRuz Media, Jogjakarta, 2014
- Miftahul Huda, *Beda Ideologi Teroris dengan Koruptor*, Independensi Pres, Jakarta, 3017,
- Syamsuri, *Membaca Jejak-jejak Perlawanan Perempuan terhadap Ketidakadilan*, Visimedia, Jakarta, 2011
- Sudibyo, *Perempuan, Birokrasi, dan Korupsi*, Lautan Ilmu, Jakarta, 2010.

Makalah

- Maulana Ishak, *Koruptor Regeneratif (Catatan Harian untuk Berita Para Koruptor)*, IKA FH-Malang, 2013
- Umi Farida, *Perempuan dan Korupsi*, Makalah untuk Kelompo Perempuan Anti Korupsi, PSHK-Malang, 2012

Internet/Ejournal

- Dewi Sekar Kencono dan Bhakti Wisnu Wardhana Perempuan Dan Korupsi Pada Ranah Publik (Ditinjau dari Gaya Kepemimpinan, Politik, Agama, Psikologi dan Budaya Ketimuran), dalam <http://ejournal?Undip>, akses 16 Desember 2021.
- Fajar Kurnianto, Menuhankan Uang, <https://serambiwicana.wordpress.com/2012/07/31/menuhankan-uang/>, akses 2 September 2021.
- Hasan Ramadhan, *Perempuan dan Korupsi*, <http://www.jurnalperempuan.org/perempuan-dan-korupsi.html>, Akses 1 September 2021.
- Linda Siti Komah, Uang Bukan Tuhan. Tapi Kehancuran bagi Mereka yang Menuhankan Uang, http://www.kompasiana.com/dolphin_nda/uang-bukan-tuhan-tapi-kehancuran-bagi-mereka-yang-menuhankan-uang_551087f2a33311cf39ba83cb, akses 2 September 2021.

Maeda Yoppi, *Gerakan Perempuan dan Korupsi*,
<http://www.asppuk.or.id/index.php/berita/134-gerakan-perempuan>,
akses 2 September 2021.

Noam Chomsky (2006), *Failed State, The Abuse of Power and The Assault on Democracy*. Diunduh dari <http://libgen.info/view.php?id=306037>.
Diakses 6 Desember 2019.